

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Masalah yang paling besar dihadapi setiap masyarakat adalah kemiskinan. Kemiskinan adalah salah satu masalah yang sulit dihadapi oleh para pembuat kebijakan. kemiskinan di Luwu Utara. Kabupaten Luwu Utara, belum bisa keluar dari persoalan kemiskinan ,penduduk kategori miskin di daerah berjumlah Lamaraginang masih cukup tinggi mencapai 42.200 orang atau 13,41 persen dari total penduduk Luwu utara pada tahun 2020. Angka ini hanya turun sedikit dibandingkan dengan tahun 2019-2018. Dimana data BPS menunjukkan, penduduk miskin Luwu Utara tahun 2019 sebanyak 42,480 jiwa dan pada tahun 2018 Rp 329,967, 2019 Rp 342 277,dan tahun 2020 Rp 354 669. Wakil bupati luwu utara mengatakan, salah satu program utamanya adalah pengetasan kemiskinan. Sedangkan tingkat kemiskinan di Luwu Utara, Menurut data BPS di urutan tiga terbawah se- Sulawesi Selatan. Luwu Utara adalah daerah yang jumlah desanya terbesar mendapatkan dana afirmasi kinerja karena keberhasilannya, tapi disisi lain tidak bisa dipungkiri, cukup banyak desa yang sebenarnya secara realita bisa maju, bahkan berkembang hingga mandiri justru turun jadi desa sangat tertinggal.

Padahal disisi lain tingkat pertumbuhan ekonomi Luwu Utara cukup tinggi, dan tingkat keparahan kemiskinan di Luwu Utara tidak dalam, yang berarti tidak terjadi kesenjangan pendapatan yang cukup tinggi selama masa pemerintahannya, rata-rata tiap tahunnya tingkat kemiskinan menurun sebesar 0,8%. Dari 14 indikator penilaian masyarakat miskin, 8 terkait dengan rumah.

Setiap tahun diintervensi bedah rumah dengan APBD yang sebelumnya hanya mengandalkan APBN.

Kemiskinan dapat diartikan sebagai akibat dari ketiadaan demokrasi, yang mencerminkan hubungan kekuasaan yang menghilangkan kemampuan warga suatu negara untuk memutuskan masalah yang menjadi perhatian mereka sendiri, sehingga mayoritas penduduk kurang memperoleh alat-alat produksi (lahan teknologi) dan sumber daya (pendidikan, kredit, dan akses pasar). selain itu, kurangnya mekanisme yang memadai untuk akumulasi dan distribusi.

Kemiskinan yang paling menyedihkan adalah kemiskinan yang timbul sebagai konsekuensi sistem ekonomi yang sedang berjalan atau dengan kata-kata lain yaitu kemiskinan struktural. Ketidakadilan tidak ada sangkut pautnya dengan kenyataan akan adanya orang miskin yang berjumlah besar dan orang kaya yang terbatas pada beberapa orang saja. Ketidakadilan terletak pada kecenderungan bahwa proses ekonomi yang menghasilkan tambahan kekayaan sosial itu hanya memungkinkan pengembangan diri golongan kaya dan tidak mengangkat golongan miskin.

Masalah kemiskinan di Indonesia menyangkut hidup tani di pedesaan, pekerja, anak-anak, orang tua, penyandang cacat, bahkan pemuda-pemuda dari keluarga melarat. Dengan adanya Pasal 34 UUD 1945 yang menetapkan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara, berarti bahwa gagasan UUD 1945 tentang negara itu mengandung penerimaan akan proses ekonomi atau sistem ekonomi yang memproduksi kemiskinan, sehingga memang akan selalu ada sebagian manusia yang dihukum untuk miskin bersama dengan

anak-anak terlantar, dan oleh karena itu negara harus turun tangan untuk memelihara mereka.

Dengan adanya program Raskin pemerintah berharap untuk dapat memenuhi sebagian kebutuhan pangan (beras) keluarga miskin sekaligus mengharapkan dapat mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan ditingkat keluarga melalui penjualan beras kepada keluarga penerima manfaat pada tingkat harga bersubsidi dengan jumlah yang telah ditentukan (Kongginawan, 2016).

Program beras untuk keluarga miskin atau yang lebih dikenal sebagai Raskin merupakan program nasional yang bertujuan untuk membantu rumah tangga Miskin (RTM) dalam memenuhi kebutuhan pangan. program ini merupakan kelanjutan operasi pasar khusus bagi RTM. Evaluasi kebijakan Raskin selama ini lebih banyak menyorot masalah efektivitas pelaksanaan program seperti pencapaian indikator 6T: tepat sasaran, tetap jumlah, tepat harga, tepat waktu, tepat kualitas, dan tepat administrasi. Sementara dampak kebijakan tersebut terhadap perubahan perilaku dan kesejahteraan penerima program belum dilakukan secara komprehensif.

Program Beras Miskin (Raskin) merupakan subsidi pangan dalam bentuk beras yang diperuntukkan bagi rumah tangga berpenghasilan rendah sebagai upaya dari pemerintah untuk meningkatkan ketahanan pangan dan memberikan perlindungan sosial pada rumah tangga sasaran (Widiarto & Surya, 2018). Program ini bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran Rumah Tangga Sasaran (RTS) melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan pokok dalam

bentuk beras. Selain itu raskin bertujuan untuk meningkatkan/membuka akses pangankeluarga melalui penjualan beras kepada keluarga penerima manfaat dengan jumlah yang telah ditentukan. Program ini salah satu program penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial di bidang pangan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat berupa bantuan beras bersubsidi kepada rumah tangga berpendapatan rendah (Rumah Tangga Miskin dan Rentan Miskin).

Penyaluran Raskin (beras untuk rumah tangga miskin) sudah dimulai sejak tahun 1998. Krisis moneter tahun 1998 merupakan awal pelaksanaan Raskin yang bertujuan untuk memperkuat ketahanan pangan rumah tangga terutama rumah tangga miskin. Pada awalnya disebut program Operasi Pasar Khusus (OPK), kemudian menjadi Raskin pada mulai tahun 2002, sesuai dengan penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh (saputro,2015) Raskin diperluas fungsinya tidak lagi menjadi program darurat melainkan sebagai bagian dari program perlindungan sosial masyarakat. Melalui sebuah kajian ilmiah, penamaan Raskin menjadi nama program diharapkan akan menjadi tepat sasaran dan mencapai tujuan Raskin.

Namun permasalahan muncul seiring berlanjutnya Program Raskin. Persoalan pengelolaan yang muncul adalah pemeriksaan terhadap kualitas beras yang lemah, distribusi yang sering kali tidak mengutamakan orang miskin, dan pengelolaan uang hasil penjualan Raskin yang tidak terkontrol. Bahkan, ada kesan digunakan untuk program yang tidak tepat seperti kasus di sejumlah daerah. Titik rawan pada program Raskin adalah pada titik distribusi. Distribusi Raskin yang tidak transparan berpotensi terjadi penyimpangan. Titik kritis distribusi Raskin

terletak pada (Widiarto & Surya, 2018):

- a. saat pengiriman beras dari gudang Bulog ke titik distribusi
- b. saat penyaluran beras kepada Rumah Tangga Miskin (RTM)
- c. Jumlah beras yang sampai di titik distribusi dan,
- d. Daftar RTM penerima Raskin, jarang sekali diumumkan sehingga masyarakat tidak tahu berapa jatah Raskin di wilayahnya.

Masyarakat hanya menerima beras sesuai jatah yang telah ditetapkan oleh aparat desa/pelaksana distribusi. Kemudian yang juga perlu diperhatikan pemerintah adalah bahwa tidak semua daerah di Indonesia menjadikan beras (nasi) sebagai makanan pokok, sehingga pemberian bantuan Raskin berupa beras di beberapa daerah di Indonesia tidak tepat sasaran.

Berdasarkan permasalahan di atas, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “ Pengaruh Program Raskin Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin di Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara”

1.1 Rumusan Masalah

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah apakah Program Raskin Berpengaruh Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Miskin di Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara?

1.2 Tujuan Penelitian

Tujuan pada penelitian ini adalah untuk mengetahui Pengaruh Program Raskin Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Miskin di Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara.

1.3 Manfaat Penelitian

Penelitian yang berhubungan dengan Pengaruh Program Raskin Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin, dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi peneliti selanjutnya sebagai bahan pengkajian yang ingin mengembangkan penelitian

1.4.2 Manfaat praktis

- a. Bagi peneliti, untuk menambah ilmu pengetahuan mengenai, Pengaruh Program Raskin Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin khususnya dalam mengukur dan menganalisa perbandingan sebelum dan sesudah pelaksanaan program raskin dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin.
- b. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat mengurangi biaya konsumsi kebutuhan pangan beras sehingga biaya konsumsi beras dapat dipergunakan untuk kebutuhan lainnya serta bisa meningkatkan kesejahteraan hidup.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Raskin

2.1.1 Program Beras Untuk Masyarakat Miskin (Raskin)

Program Beras Untuk Rumah Tangga Miskin (raskin) merupakan salah satu upaya pemerintah untuk membantu penyediaan sebagai kebutuhan pangan pokok keluarga miskin. Program raskin (program penyaluran beras untuk keluarga miskin) adalah sebuah program dari pemerintah (Lanto1 et al., 2013). Melalui pelaksanaan program raskin bersama program penanggulangan kemiskinan lainnya diharapkan dapat memberikan manfaat yang nyata dalam peningkatan ketahanan pangan dan kesejahteraan sosial rumah tangga. Selain itu program Raskin merupakan program transfer energi dalam bentuk kalori yang dapat mendukung program lainnya.

Program ini memiliki tujuan untuk mengurangi beban pengeluaran RTS melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras. Selain itu untuk program juga bertujuan untuk meningkatkan ketahanan pangan di tingkat rumah tangga sasaran, sekaligus sebagai mekanisme perlindungan sosial dan penanggulan kemiskinan. Jika diterima secara utuh, alokasi 15 kg beras per bulan akan dapat mengurangi kemiskinan sekitar 1,22% atau sekitar 2,69 jiwa.

Dampak RASKIN terhadap stabilisasi harga terlihat pada saat RASKIN hanya diberikan kurang dari 12 bulan (seperti pada tahun 2006 = 11 bulan dan tahun 2007 = 10 bulan). Harga beras akhir tahun 2006 dan awal 2007 serta akhir tahun 2007 dan awal 2008 meningkat tajam. Pada saat itulah, pemerintah

melakukan Operasi Pasar Murni (OPM) dan Operasi Pasar Khusus dari Cadangan Beras Pemerintah (OPK - CBP).

Beberapa kendala dalam pelaksanaan RASKIN selama ini terutama dalam pencapaian ketepatan indikator maupun ketersediaan anggaran. Sampai dengan saat ini, jumlah beras yang akan disalurkan baru ditetapkan setelah anggarannya tersedia. Selain itu ketetapan atas jumlah beras raskin yang disediakan juga tidak selalu dilakukan pada awal tahun, dan sering dilakukan perubahan di pertengahan tahun karena berbagai faktor. Hal ini akan menyulitkan dalam perencanaan penyiapan stoknya, perencanaan pendanaan dan perhitungan biaya-biayanya.

Peraturan perundangan yang menjadi landasan pelaksanaan program Raskin adalah (Menko Kesra, 2013:6):

1. UU No. 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Masyarakat
2. UU No. 18 Tahun 1986 tentang Pelaksanaan UU No. 8 Tahun 1985
3. UU No. 19 Tahun 2003, tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
4. UU No. 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah
5. UU No. 18 Tahun 2012, tentang Pangan
6. UU tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2013
7. Peraturan Pemerintah No. 68 Tahun 2002, tentang Ketahanan Pangan
8. Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2003, tentang Pendirian Perusahaan Umum BULOG
9. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

10. Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

11. Peraturan Presiden RI No. 15 Tahun 2010, tentang Percepatan

Tugas perum Bulog adalah sebagai berikut:

- a. Menjaga harga di tingkat petani melalui pembelian sesuai Harga Pembelian Pemerintah (HPP) untuk gabah dan beras.
- b. Menyalurkan beras untuk rakyat miskin (Raskin)
- c. Menyediakan dan menyalurkan beras untuk menaggulangi keadaan darurat dan menjaga stabilitas harga beras dalam negeri melalui pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah (CBP).

Pelaksanaan penyaluran Raskin oleh Perum BULOG sampai Titik Distribusi (TD) di seluruh Indonesia. Pemerintah Daerah memiliki peran yang sangat strategis dalam penyaluran Raskin dari TD sampai kepada Rumah Tangga Sasaran (RTS). Dukungan yang diperlukan dari pemerintah daerah minimal pengalokasian APBD untuk angkutan beras dari TD sampai ke RTS (Lengkong, 2016)

Dalam upaya meningkatkan keberhasilan pelaksanaan program Raskin, diperlukan koordinasi dan sinkronisasi seluruh instansi terkait dengan tetap mempertimbangkan beberapa nilai dasar atau prinsip-prinsip pelaksanaan, yaitu nilai-nilai dasar yang menjadi landasan atau acuan dalam setiap tindakan atau pengambilan keputusan dalam pelaksanaan program Raskin. Nilai-nilai tersebut diharapkan dapat mendorong terwujudnya tujuan program Raskin (Yunita, 2014).

1. Keberpihakan kepada Rumah Tangga Miskin (RTM), maksudnya adalah mendorong RTM untuk ikut berpartisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelestarian seluruh kegiatan Raskin, termasuk menerima manfaat atau menikmati hasilnya.
2. Transparansi, maksudnya adalah membuka akses informasi kepada pelaku Raskin terutama masyarakat penerima Raskin mengenai kegiatan Raskin serta memiliki kebebasan dalam melakukan pengendalian secara mandiri.
3. Akuntabilitas, maksudnya adalah setiap pengelolaan kegiatan Raskin harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat maupun kepada semua pihak sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku atau yang telah disepakati.

Pelaksanaan pembangunan diarahkan pada pemerataan pendapatan masyarakat agar mampu memenuhi kebutuhan dasarnya. Berbagai upaya telah dilakukan, salah satunya adalah diimplementasikannya kebijakan/program bantuan pangan (beras) untuk masyarakat miskin agar dapat meningkatkan daya beli masyarakat. Tingkat pendapatan yang rendah akan mengakibatkan taraf hidup yang rendah. Selain itu, rendahnya pendapatan ditambah dengan rendahnya pendidikan dan keterampilan menyebabkan produktifitas yang rendah, dan akhirnya tetap memiliki pendapatan yang rendah sehingga seseorang atau keluarga tertentu tidak mampu memiliki berbagai fasilitas dan sarana pembaharuan sebagai faktor penentu peningkatan kesejahteraan hidup keluarga.

Hal ini dapat disimpulkan bahwa keluarga yang memiliki pendapatan yang memadai atau tinggi, tentu akan mampu memenuhi kebutuhan dasar hidupnya. Berkaitan dengan tujuan program Raskin yaitu mengurangi beban pengeluaran

Rumah Tangga Miskin (RTM), maka pendapatan yang seharusnya dikeluarkan untuk pangan (beras) sebagiannya dapat ditabung untuk kebutuhan pokok lainnya seperti pendidikan, kesehatan, dan kegiatan lainnya. Dengan demikian dapat dilihat adanya hubungan antara keberhasilan program dengan tingkat manfaat yang diperoleh oleh RTS.

2.1.2 Distribusi Program Beras Untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin)

Titik distribusi adalah tempat di desa/kelurahan yang dapat dijangkau keluarga sasaran penerima manfaat atau jika lokasi desa sulit dijangkau dapat ditentukan di tempat lain yang disepakati secara tertulis antara pemda dengan Diver/Sub Diver/kanlog sebagai tempat penyerahan beras oleh Satgas Raskin kepada pelaksana Distribusi (Fawal, 2018)

Indikator kinerja pelaksanaan Raskin adalah: tepat sasaran , tepat jumlah, tepat harga, tepat waktu dan tepat administrasi. (Depdagri, 2009:5).

- a. Tepat sasaran yaitu raskin hanya diberikan kepada keluarga sasaran penerima manfaat yang terdaftar dalam daftar penerima manfaat;
- b. Tepat jumlah yaitu jumlah beras yang dibeli keluarga Sasaran Penerima Manfaat sesuai hasil keputusan gubernur/bupati/walikota.
- c. Tepat harga yaitu harga beras yang dibayar oleh kelurga sasaran penerima manfaat sebesar Rp. 1600/Kg netto di titik distribusi;
- d. Tepat waktu yaitu waktu pelaksana distribusi beras kepada keluarga sasaran penerima manfaat sesuai dengan rencana distribusi;
- e. Tepat administrasi yaitu terpenuhinya persyaratan administrasi yang diperlukan untuk penyelesaian subsidi dan pembayaran harga beras secara

benar dan tepat waktu;

- f. Tepat kualitas yaitu terpenuhinya persyaratan kualitas medium kondisi baik dan tidak berhama sesuai dengan standar kualitas pembelian pemerintah sebagaimana diatur dalam aturan perundang-undangan.

2.2 Konsep Kesejahteraan

a. Pengertian Kesejahteraan

Kesejahteraan adalah kondisi agregat dari kepuasan individu-individu. Pengertian dasar itu mengantarkan kepada pemahaman kompleks yang terbagi dalam dua arena perdepatan. Pertama adalah apa lingkup dari substansi kesejahteraan, kedua adalah bagaimana intensitas substansi tersebut bisa direpresentasikan secara agregat (Taufiq & Sahrin, 2018).

Menurut Abbas (2010:161) dalam bukunya yang berjudul Bung Hatta dan Ekonomi Islam, “orang merasa hidupnya sejahtera apabila ia merasa senang, tidak kurang suatu apapun dalam batas yang mungkin dicapainya, jiwanya tentram lahir dan batin terpelihara, ia merasakan keadilan dalam hidupnya, ia terlepas dari kemiskinan yang menyiksa dan bahaya kemiskinan yang mengancam”.

Tingkat kepuasan dari kesejahteraan adalah dua pengertian yang saling berkaitan. Tingkat kepuasan merujuk kepada keadaan individu atau kelompok, sedangkan tingkat kesejahteraan mengacup kepada keadaan komunitas atau masyarakat luas. Kesejahteraan adalah kondisi agregat dari kepuasan individu-individu. Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2009, Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga Negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat

melaksanakan fungsi sosialnya (Lanto1 et al., 2013).

Menurut Todaro dan Smith, kesejahteraan masyarakat menunjukkan ukuran hasil pembangunan masyarakat dalam mencapai kehidupan yang lebih baik yang meliputi:

- a. Tingkat Kebutuhan Dasar Peningkatan kemampuan dan pemerataan distribusi kebutuhan dasar seperti makanan, perumahan, kesehatan dan perlindungan.
- b. Tingkat Kehidupan Peningkatan tingkat kehidupan, tingkat pendapatan, pendidikan yang lebih baik dan peningkatan pendidikan.
- c. Memperluas skala ekonomi dan ketersediaan pilihan sosial dari individu dan bangsa. Yaitu adanya pilihan pekerjaan yang lebih baik dari masyarakat yang lebih baik untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga.
- d. Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan masyarakat terdiri dari dua kata yaitu Kesejahteraan dan Masyarakat. Kesejahteraan berasal dari kata dasar sejahtera. Sejahtera artinya aman, santosa, dan makmur, selamat (terlepas dari segala macam gangguan, kesukaran, dan sebagainya).Kesejahteraan adalah “hal dalam keadaan sejahtera, keamanan, keselamatan, dan ketentraman (kesenangan hidup dan sebagainya), kemakmuran. Konsep kesejahteraan dikembangkan menjadi lebih luas dibandingkan sekedar mengukur aspek pendapatan nominal. Kesejahteraan adalah *Standard living, wellbeing, welfare, dan quality of life*.

Pengertian kesejahteraan sosial merupakan sistem suatu bangsa tentang manfaat dan jasa untuk membantu masyarakat guna memperoleh kebutuhan sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan yang penting bagi kelangsungan

masyarakat tersebut. Seseorang yang mempunyai kekurangan kemampuan mungkin memiliki 19 kesejahteraan yang rendah, kurangnya kemampuan dapat berarti kurang mampu untuk mencapai fungsi tertentu sehingga kurang sejahtera. Terdapat beragam pengertian mengenai kesejahteraan, karena lebih bersifat subjektif dimana setiap orang dengan pedoman, tujuan dan cara hidupnya yang berbeda-beda akan memberikan nilai-nilai yang berbeda pula tentang kesejahteraan dan faktor-faktor yang menentukan tingkat kesejahteraan.

Indikator kesejahteraan dalam masyarakat itu sendiri menurut publikasi BPS, menyarankan tujuh komponen untuk mengukur tingkat kesejahteraan yaitu kependudukan, kesehatan dan gizi, pendidikan, ketenagakerjaan, taraf pola konsumsi, perumahan dan lingkungan, sosial budaya (Widyastuti, 2012)

a. Produktivitas.

Produktivitas pada penelitian ini lebih menspesifikkan terhadap perhitungan produktivitas tenaga kerja, dimana dari hasil produktivitas tersebut dapat menghasilkan sejumlah pendapatan untuk meningkatkan kesejahteraan. Produktivitas tenaga kerja adalah salah satu ukuran perusahaan dalam mencapai tujuan. Produktivitas adalah perbandingan antara hasil dari suatu pekerjaan karyawan dengan pengorbanan yang telah dikeluarkan. Peningkatan produktivitas kerja hanya mungkin dilakukan oleh manusia. Produktivitas tenaga kerja diperlukan untuk perhitungan seberapa besar pendapatan yang harus diterima oleh pekerja atas pengorbanan yang telah dilakukannya. peningkatan produktivitas dapat berpengaruh langsung pada standar hidup dalam meningkatkan kesejahteraan seorang pekerja. Penambahan tenaga kerja akan mendorong kenaikan upah,

karena menurut Prathama dan makin banyak penduduk yang berusia kerja atau usia produktif (15-64 tahun), maka makin besar tingkat konsumsi, terutama bagi sebagian besar dari mereka yang mendapat kesempatan kerja dengan upah yang wajar atau baik. Ukuran produktivitas yang paling terkenal menurut Muchdarsyah yaitu jam kerja dan hari kerja, karena produktivitas tenaga kerja dapat dihitung dengan membagi pengeluaran dengan jumlah yang digunakan atau jam-jam kerja seseorang. Mengukur produktivitas menggunakan hasil pekerjaan seseorang dalam bentuk upah dimana seberapa besar jumlah upah ditentukan oleh seberapa besar jumlah pengorbanan yang dilakukan oleh pekerja dalam bentuk jam kerja.

Mengenai tingkat kesejahteraan serikat pekerja menurun karena mempengaruhi produktivitas kesenjangan upah. Secara keseluruhan bahwa pengaruh upah riil dan produktivitas ini lebih mengarah pada keuntungan perusahaan bukan pada kesejahteraan serikat pekerjanya. permintaan atas suatu produk dengan pembayaran upah tetap berdasarkan waktu. Pengaruh implementasi bonus atau sistem pemberian bonus sebagai tambahan bagi upah tenaga kerja dapat menjadi alternatif peningkatan kesejahteraan bagi pekerja.

b. Tingkat Pendidikan

Pendidikan memiliki peran penting bagi pengembangan sumberdaya manusia yang tersedia. Bagi negara berkembang, pendidikan dasar menjadi prioritas utama untuk mengembangkan sumberdaya manusia sejak dini. pendidikan memainkan peran kunci dalam membentuk kemampuan sebuah negara berkembang untuk menyerap teknologi modern dan untuk mengembangkan kapasitas pertumbuhan dan pembangunan yang berkelanjutan. Pendidikan yang digunakan dalam

penelitian ini adalah pendidikan tenaga kerja, dimana pendidikan dapat menjamin masa depan yang lebih baik bagi pekerja karena tingkat pendidikan membuka peluang terhadap gaji tinggi. Seseorang yang berpendidikan tinggi akan mempengaruhi pola pikir, sikap dan perilakunya.

Semakin tinggi pendidikan dan kualitas pendidikan yang lebih baik serta memiliki keterampilan yang melengkapi pendidikan formal memungkinkan mereka mendapat keuntungan yang lebih tinggi. Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan juga telah diakui bahwa tidak hanya dapat meningkatkan kesejahteraan tetapi membawa orang tersebut keluar dari kemiskinan dan mengurangi kesenjangan. Pendidikan bagi tenaga kerja adalah salah satu usaha untuk pembagian kerja atau spesialisasi pekerja merupakan upaya untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Adanya spesialisasi yang dilakukannya pekerja didorong oleh faktor-faktor yaitu peningkatan keterampilan kerja, dan penemuan mesin-mesin yang menghemat tenaga. Spesialisasi dapat meningkatkan kesejahteraan seseorang secara tidak langsung melalui pendidikan, karena sangat membantu seseorang dalam pencarian lapangan kerja seefisien mungkin.

2.2.1 Kriteria Masyarakat Penerima Raskin

Pada penelitian yang dilakukan kriteria yang dibutuhkan terdiri dari beberapa faktor. Yaitu selain penghasilan keluarga dan jumlah anggota keluarga juga terdapat kriteria penerangan pada kriteria ini akan dilihat apakah dalam kesehariannya menggunakan penerangan listrik atau tidak. Jika menggunakan listrik dilihat berapa berapa besar daya yang digunakan. Selanjutnya terdapat kriteria pola makan. Berapa kali makan dalam sehari. Kemudian dilihat juga

kriteria bangunan rumah tipenya seperti apa. Dari kriteria-kriteria tersebut akan mudah menentukan penerima beras miskin (Silangen et al., 2013). Banyak pertimbangan dalam menentukan penerima beras miskin

Adapun kriteria-kriteria penerima raskin antara lain:

- a. Rumah tangga yang berpenghasilan dibawah Rp.500.000,
- b. Rumah tangga yang tidak memiliki tabungan minimal RP.1.500.000
- c. Rumah tangga yang tidak memiliki penghasilan tetap
- d. Rumah tangga yang tidak memiliki lahan pertanian
- e. Rumah tangga yang tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok (masyarakat yang memenuhi kebutuhan pokoknya dengan cara berhutang)
- f. Rumah tangga tidak dapat mengkonsumsi protein seperti ikan/telur/daging minimal 2 kali dalam seminggu
- g. Rumah tangga dengan kondisi perumahan masih mengontrak/numpang
- h. Kondisi lantai rumah tanah/semen kasar Kondisi dinding bangunan tempat tinggal masyarakat geribik/gabus, dsb,
- i. Sumber air sumur masih menimba atau manual
- j. Sumber penerangan tidak menggunakan listrik/ menggunakan listrik akan tapi masih menumpang.

2.3 Konsep kemiskinan

Kemiskinan merupakan masalah yang selalu dihadapi manusia. Masalah kemiskinan memang sama tuanya dengan usia kemanusiaan itu sendiri dan implikasi permasalahan-nya dapat melibatkan berbagai segi kehidupan manusia (Nurwati, 2008). Dengan kata lain bahwa kemiskinan ini merupakan masalah

sosial yang sifatnya mendunia, artinya masalah kemiskinan sudah menjadi perhatian dunia, dan masalah tersebut ada di semua negara, walaupun dampak dari kemiskinan berbeda-beda. Kesadaran akan kemiskinan akan dirasakan ketika membandingkan kehidupan yang sedang dijalani dengan kehidupan orang lain yang tergolong mempunyai tingkat kehidupan ekonomi lebih tinggi. Hal ini menyulitkan pemerintah ketika akan menentukan penduduk miskin, karena mereka (penduduk) sendiri tidak sadar akan kemiskinannya. Selain itu, kemiskinan dapat dilihat sebagai masalah multidimensi karena berkaitan dengan ketidak-mampuan akses secara ekonomi, sosial, budaya, politik dan partisipasi dalam masyarakat. Kemiskinan memiliki arti yang lebih luas dari sekedar lebih rendahnya tingkat pendapatan atau konsumsi seseorang dari standar kesejahteraan terukur seperti kebutuhan kalori minimum atau garis kemiskinan, akan tetapi kemiskinan memiliki arti yang lebih dalam karena berkaitan dengan ketidakmampuan untuk mencapai aspek di luar pendapatan (*non-income factors*) seperti akses kebutuhan minimum; kesehatan, pendidikan, air bersih, dan sanitasi. Kompleksitas kemiskinan tidak hanya berhubungan dengan pengertian dan dimensi saja namun berkaitan juga dengan metode yang digunakan untuk mengukur garis kemiskinan. Tulisan ini mencoba memaparkan tentang kemiskinan berdasarkan konsep, model pengukuran dan alternatif model dalam upaya mengentaskan kemiskinan.

2.3.1 Penyebab Kemiskinan

Penyebab kemiskinan dipandang dari sisi ekonomi. Pertama, secara mikro, kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumberdaya

yang menimbulkan distribusi pendapatan yang timpang. Penduduk miskin hanya memiliki sumberdaya dalam jumlah terbatas dan kualitasnya rendah. Kedua, kemiskinan muncul akibat perbedaan dalam kualitas sumberdaya manusia. Kualitas sumberdaya manusia yang rendah berarti produktivitasnya rendah, yang pada gilirannya upahnya rendah. Rendahnya kualitas sumberdaya manusia ini karena rendahnya pendidikan, nasib yang kurang beruntung, adanya diskriminasi, atau karena keturunan. Ketiga, kemiskinan muncul akibat perbedaan akses dalam modal.

1. Penyebab Kemiskinan

penyebab kemiskinan, analisis kebutuhan dan potensi yang dapat dikembangkan, dan merumuskan bentuk-bentuk program yang diinginkan oleh penduduk miskin. Selain itu, dirumuskan pula pihak-pihak yang dapat dilibatkan dalam kegiatan atau program kemiskinan, serta membuat jadwal pelaksanaannya. Setelah tahap ini selesai, maka dilanjutkan ke tahap pelaksanaan kegiatan dan diakhiri dengan tahap monitoring dan evaluasi.

2. Faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya kemiskinan diantaranya (Dp, 2017);

Ada lima faktor-Faktor yang dianggap mempengaruhi terjadinya kemiskinan yaitu:

- a. Pendidikan yang rendah, Tingkat pendidikan yang rendah menyebabkan seseorang kurang mempunyai keterampilan tertentu yang diperlukan dalam kehidupannya. Keterbatasan pendidikan atau keterampilan yang dimiliki seseorang menyebabkan keterbatasan kemampuan seseorang untuk masuk

dalam dunia kerja.

- b. Jenis pekerjaan Malas Bekerja Adanya sikap malas (bersikap pasif atau bersandar pada nasib) menyebabkan seseorang bersikap acuh tak acuh dan tidak bergairah untuk bekerja.
- c. Akses terhadap pelayanan kesehatan dasar dan infrastruktur dan lokasi geografis, Keterbatasan Sumber Alam, Suatu masyarakat akan dilanda kemiskinan apabila sumber alamnya tidak lagi memberikan keuntungan bagi kehidupan mereka.
- d. Terbatasnya Lapangan Kerja, Keterbatasan lapangan kerja akan membawa konsekuensi kemiskinan bagi masyarakat. Secara ideal seseorang harus mampu menciptakan lapangan kerja baru sedangkan secara faktual hal tersebut sangat kecil kemungkinannya bagi masyarakat miskin karena keterbatasan modal dan keterampilan
- e. Keterbatasan Modal, Seseorang miskin sebab mereka tidak mempunyai modal untuk melengkapi alat maupun bahan dalam rangka menerapkan keterampilan yang mereka miliki dengan suatu tujuan untuk memperoleh penghasilan.
- a. Kemiskinan di Tingkat Rumah Tangga

Kemiskinan dapat dilihat secara makro maupun mikro. Dalam hal makro, kemiskinan dilihat secara agregat dan luas sementara, pendekatan mikro diperlukan untuk mengetahui pasti kondisi kemiskinan, seperti siapa yang miskin dan bagaimana karakteristik mereka. Pendekatan pada level rumah tangga merupakan contoh pendekatan mikro. Rumah tangga sebagai unit analisis layak dilakukan di negara sedang berkembang. penyebab-penyebab utama, atau paling

tidak berhubungan dengan kemiskinan mencakup tiga karakteristik yaitu karakteristik wilayah, masyarakat, serta rumah tangga dan individu.

Karakteristik wilayah, mencakup kerentanan terhadap banjir atau topan, keterpencilan, kualitas pemerintah, serta hak milik dan pelaksanaannya. Sementara karakteristik masyarakat, mencakup ketersediaan infrastruktur (jalan, air, listrik) dan layanan (kesehatan, pendidikan), kedekatan dengan pasar, dan hubungan sosial. Lebih lanjut, karakteristik rumah tangga dan individu dilihat dari aspek demografi (seperti, jumlah anggota rumah tangga, struktur usia, rasio ketergantungan, dan gender kepala rumah tangga), aspek ekonomi (seperti, status pekerjaan, jam kerja, dan harta benda yang dimiliki), serta aspek sosial (seperti, status kesehatan dan nutrisi, pendidikan, dan tempat tinggal) (Oktavia & Soelistyo, 2018).

2.4 Penelitian terdahulu

Dalam penulisan ini juga telah dilakukan pengkajian hasil yang telah dilakukan para peneliti terdahulu untuk dijadikan sebagai bahan referensi selama penyusunan skripsi. Hasil penelitian terdahulu antara lain:

Tabel 2.1**Penelitian Terdahulu**

No	Nama dan Judul	Metode analisis dan variabel penelitian	Hasil penelitian
1	Efektivitas Program Beras Miskin (Raskin) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan (Widiarto & Surya, 2018)	Teknik analisis data model interaktif berupa. Variabel Program raskin (X) Meningkatkan kesejahteraan (Y)	Hasil penelitian ini Diketahui bahwa pelaksanaan Program Beras Miskin (Raskin) di Desa Tempakan Kecamatan Batu Engau, Kabupaten Paser belum sepenuhnya efektif.
2	Implementasi Program Beras Untuk Masyarakat Miskin (Raskin) Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan (Studi Di Desa Sidoharjo, Kecamatan Jambon, Kabupaten Ponorogo) (Saputro et al., 2015)	Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Program Raskin (X) Pengentasan kemiskinan (Y)	Menunjukkan bahwa implementasi Program Raskin di Desa Sidoharjo berbeda dari ketentuan yang ditetapkan. Proses implementasi dibagi menjadi dua proses pendistribusian serta pengawasan Desa Sidoharjo, Kecamatan Jambon, Kabupaten Ponorogo
3	Efektivitas Program Beras Untuk Rumah Tangga Miskin (RASKIN) di Provinsi Bali (Sudarsana Arka I Gusti Bagus Indrajaya, 2019)	Metode yang digunakan adalah model analisis yang dipilih relatif lebih sederhana. Program raskin (X) Rumah tangga Miskin (Y)	Hasil penelitian menemukan bahwa rumah tangga yang mendapatkan Program RASKIN ternyata memiliki pendapatan serta pengeluaran yang lebih tinggi.

Tabel Lanjutan

No	Nama dan Judul	Metode analisis dan variabel penelitian	Hasil penelitian
4	Efektivitas Pengelolaan Program Raskin Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Di Kelurahan Watuliandu Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka (Sudarsana Arka I Gusti Bagus Indrajaya, 2019)	Metode yang Digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Program raskin (X) kesejahteraan masyarakat (Y)	Hasil penelitian Menunjukkan bahwa program raskin berpengaruh signifikan kesejahteraan masyarakat dikelurahan watuliandu Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka
5	Implementasi Program Beras Untuk Keluarga Miskin (Raskin) dan terhadap Dampaknya Bagi Keluarga Di Kelurahan Kenanga Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon (Adawiyah et al., 2019)	Metode yang Digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif-kualitatif. Program raskin (X) Dampaknya keluarga (Y)	Hasil penelitian ini Menunjukkan bahwa Implementasi program Raskin yang ada di Kelurahan Kenanga tidak sesuai dengan aturan pemerintah.

Tabel Lanjutan

No	Nama dan Judul	Metode analisis dan Variabel penelitian	Hasil penelitian
6	Implementasi Kebijakan Program Beras Miskin (RASKIN) Di Desa Kejapanan Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan (Sataloff et al., n.d.)	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Kebijakan raskin (X)	Hasil penelitian Menunjukkan bahwa selama ini implementasi program Raskin tidak ada evaluasi dari pihak warga maupun kecamatan. Hal itu karena dari pihak Desa Kejapanan tidak memiliki
7	Implementasi Kebijakan Distribusi Program Raskin di Desa Kawengen Kabupaten Semarang (Sudarsana Arka I Gusti Bagus Indrajaya, 2019)	Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian kualitatif dengan model deskriptif Kebijakan Distribusi Program Raskin(X)	Hasil penelitian dapat Diketahui bahwa Implementasi program Raskin di Desa Kawengen Kabupaten Semarang Belum sesuai dengan Tujuan dan belum Sepenuhnya berjalan Dengan optimal seperti yang diharapkan.

Tabel Lanjutan

No	Nama dan Judul	Metode analisis dan variabel penelitian	Hasil penelitian
8	Study Implementasi Program Raskin terhadap masyarakat berpenghasilan rendah di Desa Kebumen Kecamatan Sukorejo Kabupaten Kendal (Winarni, 2012)	Metode Penelitian Ini menggunakan tipe deskriptif Program Raskin(X) masyarakat berpenghasilan rendah (Y).	Hasil penelitian Implementasi Program Raskin Desa Kebumen Kecamatan Sukorejo Kabupaten Kendal berjalan baik dan tepat sasaran, hal ini dapat dilihat dalam Implementasi pelaksanaan
9	Implementasi Program Beras Miskin (Raskin) Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah Di Kelurahan Sawang Bendar Kecamatan Tahuna Kabupaten Kepulauan Sangihe (Kongginawan, 2016)	Metode penelitian digunakan adalah Metode deskriptif Program Beras Miskin Raskin(X) Masyarakat Berpenghasilan Rendah(Y).	Secara keseluruhan dalam pelaksanaan program Raskin di Desa Bawoleu dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat menemui kendala pendataan yang tidak terdata dengan baik, lokasi geografis yang letak Desanya berjauhan yang sulit dijangkau.

Tabel lanjutan

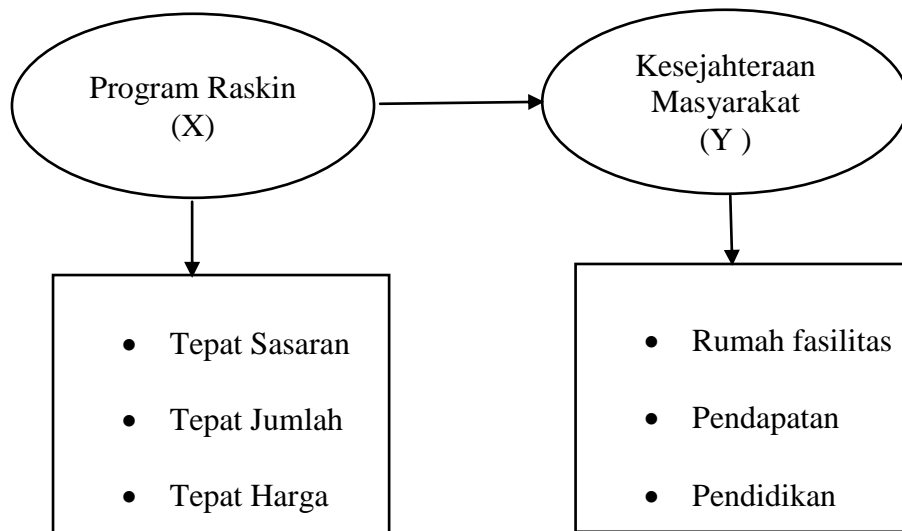
No	Nama dan Judul	Metode analisis dan Variabel penelitian	Hasil penelitian
10	Evaluasi kebijakan program masyarakat miskin (studi kasus program Raskin di Kabupaten Manokwari) (Rahayu et al., 2019)	Metode penelitian yang dipakai adalah deskriptif. Kebijakan program Raskin (X) studi kasus sprogram Raskin (Y)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepuasan penerima Raskin termasuk dalam kriteria sedang, efektivitas Program Raskin (ketepatan aturan) termasuk dalam kategori kurang baik, dan kendala Program Raskin yang terbesar di Kelurahan Manokwari Timur adalah tidak pernah adanya pelaksanaan sosialisasi Program Raskin

Sumber: Peneliti Terdahulu

2.4 Kerangka Konseptual

Program Beras Miskin (Raskin) merupakan subsidi pangan dalam bentuk beras yang diperuntukkan bagi rumah tangga berpenghasilan rendah sebagai upaya dari pemerintah untuk meningkatkan ketahanan pangan dan memberikan perlindungan sosial pada rumah tangga sasaran. Sedangkan kesejahteraan merupakan kondisi agregat dari kepuasan individu-individu. kerangka konseptual ini uraian yang telah dijelaskan sebelumnya, akan diuraikan kembali oleh peneliti yang akan dijadikan landasan berpikir kedepannya. Landasan yang dimaksud ini akan mengarahkan penulis untuk menemukan data dan informasi untuk memecahkan

masalah yang telah dipaparkan sebelumnya.



Gambar 2.1 kerangka Konseptual

2.6 Hipotesis

Hipotesis Penelitian adalah jawaban sementara terhadap pertanyaan-pertanyaan penelitian. Hipotesis dapat dijelaskan dari berbagai sudut pandang, misalnya secara etimologis, teknis, statistik, dan lain sebagainya. Umumnya pengertian yang banyak digunakan bahwa hipotesis adalah jawaban sementara penelitian.

Hipotesis dalam penelitian ini yaitu diduga bahwa program raskin berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat miskin di Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain penelitian analisis dekskriptif. Cresweel (2010:24) menyatakan bahwa, “pendekatan kuantitatif adalah pengukuran data kuantitatif dan statistik objektif melalui perhitungan ilmiah berasal dari sampel orang-orang atau penduduk yang diminta menjawab atas sejumlah pertanyaan tentang survey untuk menentukan frekuensi dan prosentase tanggapan mereka.

Untuk memperoleh data yang valid selanjutnya data yang dikumpulkan kemudian diolah menggunakan metode uji koefisien determinasi, uji validitas, uji reabilitas, statistik dekskriptif, regresi linear sederhana, serta uji hipotesis parsial. Untuk mengukur tingkat pengaruh variabel dependen terhadap variabel independen.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi dalam penelitian ini, dilakukan Di Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara kantor Dinas sosial . Waktu penelitian dilakukan kurang lebih dua bulan. Peneliti menggunakan penelitian ini karena keadaan lokasi yang mudah dijangkau juga memperoleh data-data yang sesuai, menjawab persoalan dan fenomena yang terjadi sesuai dengan pokok fokus masalah yang diajukan.

3.3 Populasi dan Sampel

Menurut Hadi (2015:190) Populasi adalah Seluruh penduduk yang dimaksudkan untuk diselidiki. Populasi dibatasi sebagai jumlah penduduk atau individu yang paling sedikit mempunyai satu sifat yang sama. Sedangkan Menurut Hadi (2015:191), sampel adalah sejumlah penduduk yang jumlahnya kurang dari populasi. Sampel harus mempunyai paling sedikit satu sifat yang sama, baik sifat kodrat maupun sifat pengkhususan. proporsi dari sampel, yaitu perimbangan antara jumlah sampel dan jumlah.

Populasi sekaligus sampel dalam penelitian diambil dari 19 desa yang menerima Raskin di Kantor Dinas Sosial di Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara sebesar 110 KK.

3.4 Jenis Data dan Sumber Data

Di lihat dari Sumber data faktor yang paling penting dalam perkembangan penentuan metode adalah pengumpulan data. Sumber data di golongan menjadi 2 yaitu data primer dan data sekunder.

3.4.1 Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang memerlukannya. Data primer juga disebut sebagai data asli (Putra, 2018). Data yang berupa hasil wawancara mengenai program raskin di Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara.

3.4.2 Data sekunder

Data sekunder adalah data yang di peroleh dari berbagai sumber seperti jurnal dan buku-buku yang berkaitan dengan Program Raskin. Yang berarti data sekunder adalah data yang di peroleh secara tidak langsung.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data di lakukan dengan menggunakan Angket/kuesioner, wawancara, dokumentasi serta observasi untuk mendapat informasi dari para responden. Adapun tehnik pengumpulan data dalam penelitian ini penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1. Kuesioner/Angket

Pada penelitian ini tehnik yang digunakan untuk mengumpulkan data yang akan diolah adalah angket. Angket adalah metode pengumpulan data dengan membuat beberapa daftar pertanyaan dalam bentuk angket/kuesioner, yang akan diberikan kemasyarakat. Pada Instrumen penelitian ini bersifat terbuka tertutup. Pertanyaan terbuka adalah jika jawaban tidak disediakan sebelumnya, sedangkan bersifat tertutup adalah jika alternatif jawaban telah disediakan.

2. Wawancara

Pada penelitian ini di gunakan tehnik pengumpulan data dengan cara wawancara, hal ini bertujuan agar dapat di peroleh data yang valid dan akurat. Wawancara di lakukan kepada narasumber yang memiliki pemahaman mengenai Program Raskin. Wawancara di gunakan pada saat peneliti ingin mengetahui pengalaman dan pendapat informan mengenai sesuatu secara mendalam.

3. Dokumentasi

Dokumentasi sebagai laporan mengenai obyek penelitian. Bertujuan agar jelas dimana informasi di dapatkan yang penulis mengabadikan dalam bentuk foto-foto kegiatan lainnya yang relevan sebagai bukti fisik kegiatan yang telah di selenggarakan.

4. Pengamatan (Observasi)

Tehnik Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan tehnik observasi atau pengamatan secara langsung terhadap suatu obyek untuk menganalisis suatu aspek yang mendasar dan penting sebagai suatu proses analisis yang akan dilakukan. Pada Pengamatan secara langsung di lapangan bertujuan sebagai suatu proses untuk menggali kemungkinan adanya suatu informasi yang mungkin terlewatkan pada saat wawancara.

3.5 Variabel Penelitian dan Defenisi Operasional

Dalam penelitian ini menggunakan variabel terikat (*dependent*) dan variabel bebas (*independent*). Variabel *dependent* merupakan sebuah variabel yang nilainya telah dipengaruhi atau bergantung pada nilai dari variabel lainnya. Variabel *independent* merupakan suatu variabel yang menjadi timbulnya adanya perubahan pada variabel dependent/terikat. Pada penelitian yang menjadi variabel *independent* yaitu Program Raskin. Sedangkan variabel *dependent* yaitu kesejahteraan masyarakat miskin.

Definis operasional yang dipakai dalam penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 3.1
Definisi operasional

Variabel	Definisi	Indikator
Program Raskin (X)	Program Raskin adalah merupakan salah upaya pemerintah untuk membantu penyediaan sebagai kebutuhan pangan pokok keluarga miskin di Kecamatan Masamba kabupaten Luwu Utara	<ul style="list-style-type: none"> • Tepat sasaran • tepat jumlah • tepat harga
Kesejahteraan Masyarakat Miskin (Y)	Kesejahteraan adalah keadaan sejahtera, keamanan, keselamatan, dan ketentraman hidup dan sebagainya), kemakmuran di kecamatan Masamba kabupten Luwu utara	<ul style="list-style-type: none"> • Rumah Fasilitas • Pendapatan • Pendidikan

Sumber: Peneliti, 2021

3.6 Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini berupa angket atau kuisisioner yang dibuat sendiri oleh peneliti. Sugiyono (2014:92) menyatakan bahwa “Instrumen penelitian adalah suatu alat pengumpul data yang digunakan untuk mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati”. Dengan demikian, penggunaan instrumen penelitian yaitu untuk mencari informasi yang lengkap mengenai suatu masalah, fenomena alam maupun sosial.

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini dimaksudkan untuk menghasilkan data yang akurat yaitu dengan menggunakan Skala *Likert*. Sugiyono (2014:134) menyatakan bahwa “Skala *Likert* digunakan untuk mengukur suatu sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang suatu fenomena sosial”. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis instrumen angket atau kuesioner dengan pemberian skor sebagai berikut:

1. SS : Sangat setuju Diberi skor 5
2. S : Setuju Diberi skor 4
3. N : Netral Diberi skor 3
4. TS : Tidak setuju Diberi skor 2
5. STS : Sangat tidak setuju Diberi skor 1

3.7.1 Uji Validitas

Uji validitas yaitu ukuran yang menunjukkan valid (sah) atau tidaknya suatu kuesioner. Kuesioner dapat dikatakan valid apabila kuesioner tersebut dapat digunakan untuk mengukur yang seharusnya diukur (Gadistri, 2020)

Uji validasi dilakukan dengan membandingkan nilai r hitung dengan r tabel, apabila nilai r hitung $>$ nilai r tabel maka kuesioner dikatakan valid dan sebaliknya, dikatakan tidak valid bila nilai dari nilai r hitung $<$ dari nilai r tabel, untuk *degree of freedom* (df) = $n-2$, dalam hal ini n adalah jumlah sampel.

3.7.2 Uji Reliabilitas

Uji reabilitas data yaitu instrumen yang dapat digunakan sebagai alat pengumpul data karena menunjukkan adanya konsistensi dan stabilitas nilai hasil dari waktu-waktu. Uji reabilitas dapat dilakukan setelah pernyataan-pernyataan

dalam kuesioner sudah memiliki validitas. Tujuan dari adanya pengujian reabilitas terhadap kuesioner adalah untuk mengetahui keandalan kuesioner, yaitu jika terjadi kesamaan hasil pengukuran dari waktu ke waktu. Instrumen dikatakan andal apabila tingkat keandalan koefisien $> 0,600$. Uji reabilitas dilakukan dengan menggunakan rumus koefisien Cronbach Alpha.(Gadistri, 2020)

3.8 Analisis Data

Analisis Regresi Linier Sederhana. Analisis regresi ini digunakan untuk menguji bagaimana pengaruh masing-masing variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y) yang diformulasikan dalam bentuk persamaan (Harlan, 2018) sebagai berikut:

$$Y = a + bX + e$$

Keterangan:

Y = Kesejahteraan Masyarakat Miskin

a = konstanta

b = Koefisien regresi

X = Program Raskin

e= nilai eror

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

4.1.1 Sejarah singkat Lokasi Penelitian

Kabupaten Luwu Utara dibentuk berdasarkan undang-undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang pembentukan daerah kabupaten Luwu Utara. Ibu kota Kabupaten Luwu Utara adalah Masamba yang berjarak 430 km kearah utara kota Makassar ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan. Kabupaten Luwu Utara berada pada posisi jalan trans Sulawesi yang menghubungkan Sulawesi Tengah,Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Utara kondisi wilayah Kabupaten Luwu Utara bervariasi terdiri dari daerah pegunungan/daratan tinggi, dataran rendah dan landau.

Masamba terletak pada jalur Trans-Sulawesi yang menghubungkan Sulawesi Selatan dengan Sulawesi Tengah ((poros Palopo - Poso) dan Sulawesi Tenggara (poros Palopo - Kolaka). Pemerintah kecamatan Masamba membawahi 4 kelurahan, 15 desa dan 2 Unit Pemukiman Transmigrasi. Kecamatan ini berada pada wilayah dengan topografi yang beragam. Sebagian desa berada pada wilayah dengan topografi yang datar dan sebagian lainnya berada pada wilayah dengan topografi berbukit-bukit. Keseluruhan wilayah Kecamatan Masamba berada pada ketinggian antara 50 sampai 300 meter di atas permukaan laut, dan memiliki sebuah bandar udara yang berada di pusat kota, yaitu Bandar Udara Andi Djemma.

4.1.2 Sejarah Singkat Program Raskin

Perum BULOG (Raskin) dibentuk pada tanggal 10 Mei 1967, berdasarkan keputusan Presidium Kabinet No.144/Kep/5/1967 dengan tujuan utama untuk mengamankan penyediaan pangan negara dalam rangka menengakan eksistensi pemerintah baru. Kemudian direvisi melalui Kappes No.39 Tahun 1969 pada tanggal 21 Januari 1969 dengan tugas pokok melakukan stabilitas harga beras, dan mengalami revisi kembali melalui Keppres No Tahun 1987, yang diharapkan dapat menyongsong tugas BULOG yang mencakup koordinasi pembangunan pangan yang multi komoditas perubahan berikutnya dilakukan melalui Keppes No .103 Tahun 1993 yang menambah tanggung jawab BULOG yaitu mencakup koordinasi pembangunan pangan yang meningkatkan mutu gizi pangan yaitu ketika kepada BULOG dirangkap oleh menteri negara Urusan pangan.

Untuk menyempurnakan struktur organisasi BULOG maka dikeluarkan Keprs NO .50 Tahun 1995 yang bertujuan untuk lebih mempertajam tugas pokok ,fungsi, dan peran BULOG . Dengan demikian tanggung jawab BULOG lebih difokuskan pada pengendalian harga dan pengelolaan persediaan bahan pokok pangan, seperti persediaan beras , gula ,gandum , terigu kedelai, pakan dan bahan pangan lainnya , baik secara langsung maupun tidak langsung maupun tidak langsung dalam rangka kestabilan harga bahan pangan bagi produsen dan konsumen. Serta memenuhi kebutuhan pangan berdasarkan kebijaksanaan umum pemerintah . namun dikeluarkan Keppres No. 45 Tahun 1997 yang menyatakan BULOG hanya sebatas mengelola komoditas beras dan gula, pada tanggal 21 Januari 1997 keppres No 19 Tahun 1998 Pemerintah mengembalikan tugas

BULOG seperti Keppres No 39 Tahun 1998 .dimna ruang lingkup komoditas yang ditangani BULOG kembali dipersempit seiring kesepakatan yang diambil oleh pemerintah dengan pihak *International Monetary Fund* (IMF) yang tertuang dalam *Letter of Intent* (LOI). Tugas utama BULOG dibatasi hanya pada komoditas beras sedangkan komoditas lainnya dilepaskan ke mekanisme pasar.

Arah pemerintah mendorong BULOG menuju suatu bentuk badan usaha mulai terlihat dengan terbitnya Keppres No .29 Tahun 2000, dimana didalamnya tersirat BULOG sebagai organisasi transisi menuju organisasi yang bergerak dibidang jasa logistik di samping tetap menangani tugas pokok BULOG ,yaitu adalah melaksanakan tugas pemerintah di bidang manajemen logistik melalui pengelolaan persediaan- persediaan .didistribusi dan pengendalain harga berasa mempertahankan harga pembelian pemerintah .serta usaha jasa logistik sesuai dengan perturan perundang-undangan yang berlaku.Arah perubahan tersebut semakin kuat dengan dikeluarkannya Keppres No.03 Tahun 2001 .Kemudiaan terdapat perubahan kembali dengan Keppres N0 03 Tahun pada tanggal 7 Januari 2002 dimana tugas pokok BULOG masih sama dengan nomenkloktur yang berbeda dan memberi waktu masa transisi sampai dengan tahun 2003.pada akhirnya dikeluarkan peraturan pemerinyah Republik Indonesia No. 07 Tahun 2003 yang menyatakan BULOG resmi beralih status menjadi perusahaan Umum (perum) BULOG.

Banyak perubahan dalam lembaga baru ini ,terutama pada pola kerja yang lebih profesional ,dan transparansi serta demokrasi .Namun ada pula yang masih dipertahankan,yaitu tanggung jawab publik, Khususnya pemantapan ketahan

pangan dan penguatan hak rakyat atas pangan Perum BULOG harus mampu menyalurkan kegiatan komersil dengan tugas dan tanggung jawab publik secara akuntabel dan transparan. Perum BULOG juga harus membuktikan bahwa memang lebih efisien dalam mengemban tugas konflik.

Selama lebih dari 30 tahun BULOG telah melaksanakan penugasan dari pemerintah untuk menangani bahan pangan pokok khususnya beras dalam rangka memperkuat ketahanan pangan Nasional. Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya status hukum BULOG adalah sebagai Lembaga pemerintah Non Departemen (LPND) berdasarkan Keppres RI No 39 tahun 1978. Namun sejak krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada tahun 1978, namun sejak krisis Ekonomi yang melanda Indonesia pada tahun 1997 timbul tekanan yang sangat kuat agar peran pemerintah dipangkas harus diserahkan sepenuhnya kepada mekanisme pasar.

Sehubungan dengan adanya tuntutan untuk melakukan perubahan, BULOG telah melakukan sebagai kajian-kajian baik oleh intern BULOG maupun pihak ekstern. Pertama, tim intern BULOG pada tahun 1998 telah mengkaji ulang peran BULOG sekarang dan perubahan lembaganya dimasa mendatang. Hal ini dilanjutkan dengan kegiatan sarasehan pada bulan Januari 2000 yang melibatkan Bulog dan Dolog selindo dalam rangka menetapkan arahan untuk penyesuaian tugas dan fungsi yang kemudian disebut sebagai "Paradigma Baru Bulog". Kedua, Kajian Ahli dari Universitas Indonesia (UI) pada tahun 1999 yang menganalisa sebagai bentuk badan hukum yang dapat dipilih oleh Bulog, atau berubah menjadi persero, Badan Hukum Milik Negara (BUMN) perjan atau

perum . Hasil kegiatan tersebut menyarankan agar Bulog memilih perum sebagai bentuk badan hukum untuk menjalankan dua fungsi persamaan yaitu, fungsi publik dan kormesial. Ketiga , kajian auditor internasional Artur andersen pada tahun 1999 yang telah mengaudit tingkat efesiensi Operasional Bulog. Secara khusus, Bulog disarankan menyempurnakan struktur organisasi dan memperbaiki kebijakan internal, sistim, proses dan pengawasan, keempat, kajian bersama dengan Benas Malaysia pada tahun 2000 untuk melihat berbagai perubahan yang dilakukan oleh Malaysia dan merancang kemungkinan penerapannya di Indonesia. Kelima, kajian konsultan Internasional Prince Waterhause Coopers (PWC) pada tahun 2001 yang telah menyusun perencanaan koperasi termasuk perumusan Visi dan Misi sertastrategi Bulog, mengalisa Cose busines dan tahapan trasformasi lembaga Bulog untuk perubahan menjadi lembaga perum. Keenam, dukungan politik yang cukup kuat dari anggota DPR RI. Khususnya komisi III dalam berbagai hearing anata Bulog dengan komisi III DPR RI selama perioide 2000-2002.

sebuah bandar udara yang berada di pusat kota, yaitu Bandar Udara Andi Djemma.

4.1.3 Kodisi Geografis

Masamba, dengan luas wilayah 1.068,85 Km², berada di tengah wilayah Kabupaten Luwu Utara. Posisi yang strategis ini menjadikan Masamba sebagai kecamatan yang ideal untuk dijadikan ibu kota Kabupaten Luwu Utara. Kecamatan

ini berbatasan dengan Kecamatan Rampi di bagian Utara, Kecamatan Mappedece

ng dan Kecamatan Malangke merupakan batas di bagian Timur dan Selatan. Sedangkan dibagian Barat berbatasan dengan Kecamatan Baebunta. Pemerintah Kecamatan Masamba membawahi 19 desa defenitif dan 3 UPT. Desa yang paling luas wilayahnya adalah Desa Lantang Tallang (253,99 Km²) atau meliputi 23,76 persen luas wilayah Kecamatan Masamba. Adapun wilayah yang mempunyai luas yang kecil adalah UPT Maipi (2,00 Km²) atau hanya 0,19 persen luas wilayah Kecamatan Masamba. Sampai dengan tahun 2017, tingkat kepadatan penduduk di Kecamatan Masamba dengan luas wilayah 1.068,85 Km² dan jumlah penduduk sebanyak 36.862 jiwa, maka tingkat kepadatan penduduk di kecamatan ini hanya sebesar 34 jiwa per Km². Dengan kata lain setiap Km luas wilayah di Kecamatan Masamba secara rata-rata hanya didiami oleh 34 orang. Pada tahun yang sama, jumlah penduduk laki-laki sebanyak 18.070 jiwa dan jumlah penduduk perempuan 18.792 jiwa. Dengan demikian maka rasio jenis kelamin adalah sebesar 96 yang artinya dari setiap 100 penduduk perempuan terdapat 96 penduduk laki-laki.

4.1.4 Kondisi Sosial

Kultur Sosial Budaya masyarakat merupakan hal yang mutlak untuk dipertimbangkan dalam mengembangkan suatu daerah dan diusahakan akan tetap. Masalah budaya tidak terlepas dari masalah keagamaan, secara umum masyarakat Kabupaten Luwu Utara adalah mayoritas memeluk agama Islam.

a. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 tercatat sebanyak 305.468 jiwa yang terdiri dari laki-laki 153.246 jiwa (50,17%), perempuan

152.222 jiwa (49,83 %) yang tersebar di 11 Kecamatan. Jumlah penduduk terbesar yakni 47.907 jiwa (15,68%) mendiami Kecamatan Bone-Bone dan jumlah penduduk yang terkecil yakni 2.999 jiwa (0,98%) jiwa mendiami Kecamatan Rampi

b. Agama/Kepercayaan

kehidupan keagamaan masih dapat di katakan sangat kental, ini di karenakan sebagian besar mayoritas masyarakatnya beragama agama islam. Hampir di setiap Wilayah terdapat masjid dan Mushollah sebagai sarana fisik ritual keagamaan juga sebagai sarana komunikasi yang di harapkan dapat mengantar kepada gerbang pembangunan di berbagai aspek yang berujung pada perolehn keridhaan Allah swt.

4.2 Hasil Penelitian

4.2.1 Deskripsi Responden

Karakteristik responden dalam memberikan pernyataan dan penilaian atas pertanyaan yang di ajukan oleh penulis. Kuesioner berisikan 12 item pernyataan yang di sebarakan peneliti kepada 110 KK penerima raskin , di mana responden yang dinyatakan dalam kuesioner adalah Jenis jumlah keluarga, usia, lamanya bekerja serta dari masing-masing responden. Adapun jawaban tentang responden di jelaskan sebagai berikut:

a. Karakteristik Responden Berdasarkan Jumlah keluarga

Karakteristik responden berdasarkan usia pada penelitian ini dapat di lihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.1 Responden Berdasarkan Jumlah keluarga

Jumlah Keluarga	Frekuensi	Prestase (%)
2-4	40	36,36 %
5-7	70	63,64%
Total	110	100%

Sumber: Data diolah 2021

Berdasarkan tabel 4.2 di atas, Karakteristik responden berdasarkan Jumlah keluarga di ketahui bahwa responden Jumlah keluarga 2-4 sebanyak 40 orang atau sekitar 36,36 % dari keseluruhan jumlah responden sedangkan responden Jumlah keluarga 5-7 sebanyak 70 orang atau sekitar 63,64 % dari keseluruhan jumlah responden. Sehingga dapat di simpulkan bahwa rata-rata responden pada penelitian ini didominasi oleh 5-7 Jumlah keluarga. Hal tersebut di karenakan Jumlah keluarga 5-7 yang terdata Di Kantor Dinsos sebagian besar adalah 5-7 Jumlah Keluarga.

b. Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan

Karakteristik responden berdasarkan Pekerjaan dapat di lihat pada tabel berikut:

Tabel 4.2 Responden Berdasarkan Pekerjaan

Pekerjaan	Frekuensi	Prestase (%)
Wiraswasta	35	31,82%
Petani	75	68,18%
Total	110	100%

Sumber: Data diolah 2021

Berdasarkan tabel 4.3 di atas, Karakteristik responden berdasarkan Pekerjaana di ketahui bahwa Jumlah Responden yang bekerja sebagai Wiraswasta sebanyak 35 orang atau sekitar 31,82 % dari keseluruhan jumlah Responden sedangkan Jumlah Responden yang bekerja sebagai Petani sebanyak 75 atau sekitar 68,18 % dari keseluruhan jumlah Responden. Sehingga dapat di simpulkan bahwa rata-rata responden pada penelitian ini didominasi oleh Petani. Hal tersebut

di karenakan Pekerjaan yang terdata Di Kantor Dinsos sebagian besar adalah Petani.

4.2.1 Uji Validitas Dan Uji Reliabilitas

a. Uji Validitas

Pengujian validitas instrumen di lakukan dengan bantuan perangkat lunak SPSS, nilai validitas dapat dilihat pada kolom *Corrected Item-Total Correlation*. Jika angka korelasi yang diperoleh lebih besar daripada angka kritik ($r \text{ hitung} > r \text{ tabel}$) maka instrumen tersebut dikatakan valid, dan jika ($r \text{ hitung} < r \text{ tabel}$) maka instrumen tersebut dikatakan tidak valid (Dura, 2018). Adapun uji validitas pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 4.3 Hasil Uji Validitas Instrument Penelitian

Variabel Penelitian	Pernyataan	r Hitung	r Tabel	Keterangan
Program Raskin (X)	1	0,722	0,186	Valid
	2	0,633	0,186	Valid
	3	0,747	0,186	Valid
	4	0,710	0,186	Valid
	5	0,755	0,186	Valid
	6	0,628	0,186	Valid
Kesejahteraan Masyarakat Miskin (Y)	1	0,590	0,186	Valid
	2	0,759	0,186	Valid
	3	0,633	0,186	Valid
	4	0,753	0,186	Valid
	5	0,731	0,186	Valid
	6	0,570	0,186	Valid

Berdasarkan tabel Uji Validitas Program Raskin (X) dan Kesejahteraan masyarakat Miskin (Y), di atas dapat di simpulkan bahwa setiap item pernyataan untuk masing-masing variabel dinyatakan valid. Hal ini dilihat dari r hitung, dimana apabila $r \text{ hitung} > r \text{ tabel}$ maka pernyataan di katakan Valid.

b. Uji Reliabilitas

Uji Reliabilitas digunakan untuk mengukur kuesioner. Menurut Wiratna Sujarweni Di katakan reliable apabila *Cronbach alpha* > 0,6. Hasil pengujian realibilitas dapat dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.4 Hasil Uji Reliabilitas Instrumen Penelitian

Variabel Penelitian	Alpha	Keterangan
Program Raskin(X)	0,798	Reliabel
Kesejahteraan Masyarakat Miskin (Y)	0,763	Reliabel

Sumber : Data diolah 2021

4.2.3 Analisis Deskriptif

Analisis Deskriptif memberikan sebuah gambaran mengenai tanggapan responden terhadap penelitian ini. Adapun hasil analisis deskriptif dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.5 Analisis Descripif Statistic

	Mean	Std.Deviation	N
Program Raskin(X)	26,97	2,565	110
Kesejahteraan Masyarakat Miskin (Y)	26,80	2,314	110

Sumber: Data hasil olahan SPSS, 2021

Berdasarkan Tabel di atas di ketahui bahwa semua Program Raskin memiliki nilai rata-rata 26,97 dengan standar deviasi 2.565 dan variabel Kesejahteraan Masyarakat Masyarakat Miskin dengan nilai rata-rata 26,80 dengan standar deviasi 2,314.

4.2.4 Hasil Uji Regresi Sederhana

Untuk mengetahui pengaruh variabel Program Raskin terhadap Kesejahteraan

Masyarakat Miskin di Kecamatan Masamba oleh karena itu penelitian ini perlu uji hipotesis menggunakan analisis regresi sederhana. Dengan menggunakan program SPSS Versi 20 di dapat model Regresi berikut:

$$Y = a + BX + e$$

Uji Regresi linear sederhana untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh variabel independent terhadap variabel dependent. Besarnya pengaruh variabel independent terhadap variabel dependent secara simultan dapat di hitung melalui persamaan regresi linear sederhana. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang di ajukan, maka data yang di hasilkan pada analisis regresi sederhana adalah sebagai berikut:

Tabel 4.6 Hasil Analisis Regresi Sederhana

1	Model	Unstandardized Coefficient		Standardized Coefficient	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
	(Constant)	17,830	2,205		8,085	,000
	Program Raskin (X)	,333	,081	,367	4,102	,000

Sumber: Data hasil olahan SPSS, 2021

Berdasarkan analisis data menggunakan SPSS 20, maka di peroleh data sebagai berikut:

$$Y = 17,830 + 0,367X + e$$

Persamaan hasil perhitungan koefisien regresi sederhana di atas memperlihatkan pengaruh antara variabel independent dengan variabel dependent dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Nilai konstanta (a) =17,830 artinya apabila program raskin tidak ada sama dengan nol maka kesejahteraan masyarakat 17,830
- b. Koefisien Regresi (b) sebesar 0,367 artinya setiap ada peningkatan program raskin sebesar satu satuan maka kesejahteraan masyarakat meningkat sebesar 0,367.

Tabel 4.7 Korelasi dan Koefisien Determinasi

Model summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,367	,135	,127	2,150

Sumber : Data hasil olahan SPSS, 2021

Berdasarkan hasil uji koefisien pada tabel di atas, diketahui bahwa nilai koefisien kolerasi (R) Sebesar 0,367 yang berarti diatas terdapat korelasi/hubungan Program Raskin dengan kesejahteraan Masyarakat Miskin di kecamatan Masamba Kabupaten Luwu utara. Adjusted R Square sebesar 0,127 yang berarti variasi atau perubahan variabel Kesejahteraan Masyarakat Miskin (Y) dapat dijeskan atau dipengaruhi oleh variasi variabel Program Raskin (X) sebesar 12,7% sedangkan sisanya sebesar 87,3% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam peneliti ini.

- c. Uji Hipotesis Regresi Secara Parsial (Uji t)

Uji t digunakan untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh secara parsial variabel independen terhadap variabel dependen Signifikasi yang di gunakan adalah 0,5.

Tabel 4.8 hasil analisis Uji t ($\alpha = 0,5$)

coefficients

1	Model	Unstandardized	Standardized	T	Sig.
---	-------	----------------	--------------	---	------

		Coefficient		Coefficient		
		B	Std. Error	Beta		
	(Constant)	17,830	2,205		8,085	,000
	Program Raskin (X)	,333	,081	,367	4,102	,000

a. Dependen Variabel Kesejahteraan masyarakat Miskin

Berdasarkan tabel diatas jika t hitung lebih besar dari tabel maka hipotesis di terima. Dari hasil perhitungan t hitung sebesar 4,102 dibandingkan dengan t tabel yaitu 1,98197 dengan taraf signifikan 5% $t_{hitung} > t_{tabel}$, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel X berpengaruh signifikan terhadap variabel Y. Sehingga dari hasil pengujian hipotesis terbukti bahwa terdapat pengaruh Program Raskin terhadap kesejahteraan masyarakat miskin di Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara.

.4.3. Pembahasan

Berdasarkan hasil analisis data, penelitian ini menguji pengaruh Program Raskin dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin di kecamatan Masamba dengan Hipotesis : Di duga Program raskin Berpengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Miskin di Kecamatan Masamba kabupaten Luwu Utara. Hal tersebut dibuktikan berdasarkan hasil analisis korelasi (R) Sebesar 0,367, bahwa terjadi hubungan kuat antara program raskin dengan kesejahteraan masyarakat miskin. Sedangkan arah hubungan adalah signifikan karena nilai r signifikan, berarti semakin banyak bantuan program raskin maka semakin sejahterah masyarakat miskin. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa hipotesis (H_a) direrima, dengan nilai koefisien determinasi (r^2) diperoleh angka 0,127 hal

ini menunjukkan bahwa 12,7% variasi dari tinggi rendahnya program raskin sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti.

Dari hasil Uji t diketahui bahwa Program Raskin (X) berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat miskin (Y). Hal ini dibuktikan dengan hasil perhitungan uji t hitung sebesar 4,102, sedangkan pada t tabel adalah 1,98197 pada taraf signifikan 10% yang berarti bahwa H_a di terima. Selain itu juga diperoleh persamaan regresi $Y=17,830 + 0,367 X$, dimana Y merupakan lambang dari variabel terikat, a konstanta, b koefisien regresi untuk variabel bebas X. Sehingga dapat disimpulkan berdasarkan hasil Uji t, terdapat pengaruh antara variabel X terhadap variabel Y, dengan kata lain H_a diterima yaitu : Program Raskin berpengaruh terhadap Kesejahteraan Masyarakat Miskin di Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara.

Nilai konstanta pada persamaan regresi berdasarkan perhitungan statistic sebesar 17,830, artinya jika Program Raskin (X) mengalami kenaikan sebesar 1 satuan maka kesejahteraan masyarakat Miskin akan meningkat sebesar 0,367. koefisien bersifat signifikan antara variabel Program Raskin (X) dengan Kesejahteraan Masyarakat Miskin (Y), semakin tinggi Bantuan Program Raskin maka semakin sejahterah pula masyarakat di tempat tersebut. Berdasarkan penjelasan diatas maka hipotesis yang menyatakan bahwa program raskin berpengaruh signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin di Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara terbukti sesuai dengan hasil peneliti terdahulu (Sudarsana Arka I Gusti Bagus Indrajaya, 2019) yang menunjukan bahwa hasil penelitiannya program raskin berpengaruh signifikan terhadap

kesejahteraan masyarakat. Program raskin berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat karena Program beras untuk rumah tangga miskin (Raskin) merupakan salah satu upaya pemerintah untuk membantu penyediaan sebagai kebutuhan pangan pokok keluarga miskin. Melalui pelaksanaan program Raskin bersama program bantuan penanggulangan kemiskinan lainnya diharapkan dapat memberikan manfaat yang nyata dalam meningkatkan ketahanan pangan dan kesejahteraan sosial rumah tangga.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa program raskin berpengaruh signifikan terhadap peningkatan Kesejahteraan Masyarakat miskin di Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara. .

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka saran yang di ajukan penulis adalah:

1. Untuk Pemerintah Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara lebih meningkatkan bantuan program raskin karena memiliki dampak positif bagi peningkatan Kesejahteraan masyarakat miskin maka diharapkan agar program ini terus dilaksanakan secara berkelanjutan dengan terus menerus memperbaiki pendistribusiannya sehingga dapat menjangkau seluruh yang ada dititik distribusi.
2. Untuk masyarakat Peraturan dan pelaksanaan Program raskin di kecamatan Masamba Kabupaten Luwu utara harus dijalankan dengan benar oleh tidak boleh membuat kebijakan sendiri.
3. Untuk peneliti selanjutnya agar menabahnya variabel yang tidak ada dalam penelitian ini.

DAFTAR RUJUKAN

- Adawiyah, R., Faoziyah, S., & Suryatna, Y. (2019). Implementasi Program Beras Untuk Keluarga Miskin (Raskin) Dan Dampaknya Bagi Keluarga Di Kelurahan Kenanga Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689-1699.
- Dp, M. K. (2017). Analisis Faktor-Faktor Penyebab Kemiskinan (Studikasuk Di Kecamatan Sungai Lilin). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Global Masa Kini Volume*, 5(01), 16-20.
- Dura, J. (2018). Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa, Kebijakan Desa, Dan Kelembagaan Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Ilmiah Bisnis Dan Ekonomi Asia*, 10(2), 26–32. <https://doi.org/10.32812/jibeka.v10i2.70>
- Fawal, N. (2018). Analisis Manfaat Program Beras Miskin Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Di Desa Pematang Ganjang Kabupaten Serdang Bedagai.
- Harlan, J. (2018). Analisis Regresi Linear. In *Journal of Chemical Information and Modeling* (Vol. 53, Issue 9).
- Kongginawan, G. (2016). Implementasi Program Beras Miskin (Raskin) Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah Di Kelurahan Sawang Bendar Kecamatan Tahuna Kabupaten Kepulauan Sangihe. *Jurnal Administrasi Publik UNSRAT*, 3(41).
- Lanto1, J., Kairupan3, A. R. J., & Abstrak. (2013). Peranan Pemerintah Desa Dalam Menunjang Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat (Suatu Studi di Desa Bawoleu Kecamatan Tagulandang Utara). *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689-1699.
- Lengkong, F. D. J. (2016). Efektivitas Program Beras Sejahtera Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Pra Sejahtera Di Kecamatan Ranoyapo Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Administrasi Publik*, 1(37).
- Nurwati, N. (2008). Kemiskinan: Model Pengukuran , Permasalahan dan Alternatif Kebijakan. *Jurnal Kependudukan Padjadjaran*, 10(1), 1-11.
- Oktavia, N. E. M., & Soelistyo, A. (2018). Faktor-Faktor Penentu Kemiskinan di Indonesia: Analisis Rumah Tangga. *Jurnal Ilmu Ekonomi Terapan*, 4(1), 17–33.

- Rahayu, Y. P., Waimbo, D. E., & Kabiay, M. (2019). Evaluasi Kebijakan Pro Masyarakat Miskin (Studi Kasus Program Raskin Di Kabupaten Manokwari). *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 22(1), 121-146.
<https://doi.org/10.24914/jeb.v22i1.2125>
- Saputro, B. A., Noor, I., & Siswidiyanto. (2015). Implementasi Program Beras Untuk Masyarakat Miskin (Raskin) Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan. *Jurnal Administrasi Publik*, 3(12), 2028-2032.
- Sataloff, R. T., Johns, M. M., & Kost, K. M. (n.d.). Implementasi Kebijakan Program Beras Miskin (RASKIN) Di Desa Kejapanan Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan. 29-42.
- Silangen, M., Lalenoh, J., & Latumakulita, L. (2013). Kelayakan Penerima Beras Miskin Di Kampung Gunung Kematan Tabukan Tengah Menggunakan Sistem Penunjang Keputusan. *Jurnal Ilmiahbehongang*, 7-10.
- Sudarsana Arka I Gusti Bagus Indrajaya. (2019). Kata Kunci: Efektivitas Program, RASKIN, Rumah Tangga, Bali Klasifikasi JEL: C35, D7, J13. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, Vol. 12, 213-222.
- Taufiq, Y. S., & Sahrin, S. (2018). Efektivitas Pengelolaan Program Raskin Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Di Kelurahan Watuliandu Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka. *Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi*, 1-11.
<http://ojs.uho.ac.id/index.php/rezpublica/article/view/44>
- Widiarto, A., & Surya, I. (2018). Efektivitas Program Beras Miskin (Raskin) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan. 6(4), 678-688.
- Winarni, A. T. (2012). Study Implementasi Program Raskin Di Desa Kebumen Kecamatan Sukorejo Kabupaten Kendal. *Serat Acity-Jurna*
- Widyastuti, A. (2012). Analisis Hubungan Antara Produktivitas Pekerja Dan Tingkat Pendidikan Pekerja Terhadap Kesejahteraan Keluarga Di Jawa Tengah Tahun 2009. *Economics Development Analysis Journal*, 1(2).
<https://doi.org/10.15294/edaj.v1i2.472>
- Yunita, Y. (2014). *Evaluasi Keberhasilan Program Beras Untuk Rumah Tangga (Program Raskin) dan Mnfaatnya Bagi Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) Di kecamatan IV Nagari Bayang Utara Kabupaten Pesisir Selatan*. 1-107.

